

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DANAU POSO OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso)

*Chessy Meiliani Patricia Rembang¹
Marthen Kimbal²
Johny Lengkong³*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Program yang dikemukakan oleh Donald P. Warwick. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah. Dalam Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu faktor Pendorong dan faktor Penghambat. Hasil penelitian ditinjau dari teori yang dikemukakan yaitu Donald P. Warwick, Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Program strategis seperti mengadakan event-event (icon) berupa kegiatan Festival danau poso serta mengeksplorasi pesona objek wisata yang ada di kecamatan pamona puselemba kabupaten poso. Sejauhmana ini faktor pendorong internal memberikan kontribusi terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah melalui kesejahteraan masyarakat. Saran Pemerintah daerah Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. meningkatkan anggaran dalam sector pariwisata dan sumberdaya manusia, agar tidak hanya terfokus pada satu titik program saja karena kurangnya anggaran yang ada serta Pemerintah daerah lebih lagi meningkatkan kepedulian akan kawasan festival danau poso bukan hanya pada saat kegiatan itu berlangsung.

Kata Kunci: Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kabupaten Poso Merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Poso Mempunyai Visi, yaitu terwujudnya kabupaten poso yang Damai, Adil, Sejahtera, yang mendukung Sumber Daya Manusia yang Andal dan Bermatabak. Sedangkan Misinya salah satu yaitu Meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha kecil menengah (UKM), koperasi, bundes, pertanian, dan pariwisata. Kabupaten Poso memiliki kekayaan wisata yang sangat berpotensi untuk dijaga dan dikembangkan, serta dilestarikan, sehingga ini biasa menjadi unggulan utama bagi daerah Kabupaten Poso. Semuanya itu merupakan sumber modal bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Oleh karena itu, pariwisata yang sebelumnya merupakan ikon ketiga pemerintah daerah Kabupaten Poso diangkat menjadi ikon pertama. Salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki berbagai macam obyek wisata cukup menarik adalah objek wisata yang tersebar di Kabupaten Poso yaitu di Tentena Kecamatan Pamona Puselemba, yaitu Danau Poso. Berbagai upaya-upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terbukti lewat hasil nyata yang bisa dilihat dari kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kabupaten Poso pada 2012 berjumlah 15.775, 2013 berjumlah 29.248, 2014 berjumlah 33.619, 2015 berjumlah 46.755, dan 2016 berjumlah 82.159. Dilihat dari data kunjungan yang ada dalam empat tahun terakhir setiap tahun sudah mengalami peningkatan. (Dinas Pariwisata Kab Poso 2016)

Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-

2032 Bab II, Pasal 5, ayat(6), Huruf e berisi “Mengembangkan kawasan pariwisata Danau Poso, Lembah Bada, Lemba Besoa, Taman Nasional Lore Lindu, Poso Pesisir dan Madale melalui optimalisasi pariwisata alam, budaya dan buatan melalui penciptaan identitas (icon) wisata khas Kabupaten Poso yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disertai pengembangan yang berkesinambungan, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun kawasan pariwisata yaitu Danau Poso merupakan salah satu objek wisata di Sulawesi Tengah yang memiliki obyek wisata alam yang sangat indah dan menarik. Danau poso termasuk sasaran pokok pengembangan pariwisata. Beberapa obyek wisata alam yang ada di kawasan Danau Poso antara lain Air Terjun Saluopa, Pantai Siuri, Gua Latea, Gua Pamona, Taman Anggrek Bancea, dan Taman Wisata Wera. Keindahan alam yang merupakan daya Tarik obyek wisata di kawasan Danau Poso lokasinya berada di sekitar pemukiman masyarakat setempat. Peranan Pemerintah dan Masyarakat setempat sangat menentukan tetap terpeliharanya daya Tarik wisata alam tersebut. Dimana yang menjadi salah satu program strategis dari pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasan pariwisata yang ada di danau poso, yaitu dengan Melaksanakan Program Festival Danau Poso (FDP) Sesuai Kebijakan yang ada. Festival Danau Poso Merupakan festival yang di selenggarakan di Kota Tentena Tepatnya di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan salah satu ajang promosi akan potensi wisata yang ada di Danau poso dan juga bertujuan untuk memperkenalkan kesenian budaya dan pariwisata yang

terdapat di daerah Poso pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Tepatnya pada tahun 1989 Festival Danau Poso diselenggarakan. Namun konflik horizontal yang terjadi pada tahun 1998 di kabupaten yang dijuluki Sintuwu Maroso tersebut harus menghentikan kegiatan Festival Danau Poso selama 9 tahun lamanya. Kemudian digelar kembali Pada tahun 2007 sampai sekarang. Karena Festival Danau Poso ini sudah menjadi Kegiatan Tahunan di Kabupaten Poso. Adapun beberapa Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Festival Danau Poso diantaranya, Lomba music bambu, Lomba menangkap ikan sidat(ikan khas danau poso), Pemilihan Putri danau poso, Lomba menari Dero, Lomba Kuliner tradisional, pentas budaya dan Olahraga. Pelaksanaan Program Festival ini dari tahun ke tahun mengalami perubahan hingga tahun terakhir ini tahun 2016 Dimana Pelaksanaannya bole terlaksana dengan tidak menimbulkan suatu kendala atau masalah dalam hal ini dapat dikatakan kegiatan yang terstruktur sesuai konsep yang ada. Dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya begitupun dengan jumlah kunjungannya semakin meningkat. Dengan adanya kegiatan tahunan ini sangat menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat khususnya di kecamatan pamona puselemba yang membuka usaha kecil yaitu tempat makan, Penginapan atau Hotel dan lain sebagainya dan juga menguntungkan bagi daerah khususnya kabupaten poso. Kemudian terlepas dari program kegiatan Festival danau poso tersebut terlihat sudah minim kepedulian dari pengelola yaitu Pemerintah Daerah akan Kawasan pariwisata Yang ada di Danau Poso dalam hal ini menjaga/memelihara

tempat pusat festival ataupun objek wisata yang ada , misalnya yaitu kepedulian akan kawasan pariwisata yang ada hanya pada saat kegiatan khususnya lokasi festival danau poso itu sendiri yang dimana sarana dan prasarana bahkan fasilitas yang ada didalam dalam hal ini rumah-rumah adat atau tempat kontingen yang sudah tidak terawat atau sudah tidak layak pakai dan juga ada tempat objek wisata yang sudah tidak terurus. Jadi untuk itu agar terus mengembangkan kawasan pariwisata yang ada dan juga bisa menambah minat atau jumlah kunjungan wisatawan yang datang berwisata di Danau Poso khususnya Kabupaten Poso, pemerintah daerah harus tetap bekerja sama dengan masyarakat setempat.

Tinjauan Pustaka

Santosa (2009:43) juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Menurut Syukur Abdullah (2011:398) bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi. Sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program yang ditetapkan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
2. Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil

yang dicapai “outcome” unsure yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.

3. Dalam proses implementasi sekarang-sekarang terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu: a) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh Karena itu factor lingkungan (fisik, social, budaya, dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan pada umumnya. b) Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut. c) Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan. d) Unsur perencanaan atau implementasi, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang-cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri. Disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan

implementasi baru yang akan dimulai apabila tujuan dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobilisator atau para aparat yang berkepentingan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan output atau outcome bagi masyarakat proses menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan intruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan dan sikap (Moekijat 2007:8). Pengembangan adalah suatu perubahan dalam orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja lebih efektif. Hasil pengembangan adalah pegawai yang memiliki pengetahuan atau informasi baru, dapat menerapkan apa yang ia ketahui (kellog dalam Moekijat, 2007;2) Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana penilaian dan penyempurnaan terus dilakukan dalam suatu organisasi serta memberikan informasi mempengaruhi sikap orang agar manusia tersebut dapat bekerja lebih efektif.

Kawasan (dari bahasa jawa kuna, kawasan yang berarti daerah wesa, dari bahsa sansekerta: "memerintah") artinya daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokkan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industry, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi. Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata. Jika dikaitkan dengan pariwisata air, pengertian tersebut berarti suatu

kawasan yang disediakan dengan daya Tarik kawasan perairan. Perkembangan suatu kawasan wisata tergantung pada apa yang dimiliki oleh kawasan tersebut untuk ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran para pengelola kawasan wisata. Kesuksesan dari suatu kawasan wisata sangat tergantung pada atraksi (attraction), mudah dicapai (accessibility), dan fasilitas (amenities), serta beberapa faktor pendukungnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000). Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Metode kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah. Dalam .Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu faktor Pendorong dan faktor Penghambat.

Yang dimana setiap indicator memiliki beberapa aspek, yakni Faktor Pendorong :

1. Komitmen pemimpin politik
 2. Kemampuan Organisasi
 3. Komitmen para pelaksana (implementer)
 4. Dukungan dari kelompok pelaksana
- Kemudian untuk faktor Penghambat :
1. Banyaknya pemain (Aktor) yang terlibat
 2. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda.
 3. Kerumitan yang melekat dalam program itu sendiri
 4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabuapten Poso,
- b. Kepala Bidang Destinasi
- c. UPT Pariwisata Pamona Puselemba Kabupaten Poso
- d. Tokoh Adat 1 orang
- e. 3 (tiga) orang Masyarakat

Hasil Penelitian

Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, (2011;17) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (Facilitating conditions), dan faktor penghambat (Impending conditions). Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah

- a. Komitmen pimpinan politik

Komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas. Robbins dan Judge (2007)

mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa. Dimana sesuai dengan visi misi dari Bupati Kabupaten Poso yaitu Sumber Daya Manusia yang Andal dan Bermatabak. Sedangkan Misi nya salah satu yaitu Meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha kecil menengah (UKM), koperasi, bundes, pertanian, dan pariwisata. Sesuai dengan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 2 (Kasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata) “Mengatakan Pemerintah daerah memiliki beberapa program untuk dapat mendorong pengembangan kawasan pariwisata danau poso, yaitu :

1. Mengadakan Festival-Festival Budaya dan Pegelaran seni ;
2. Pengembangan Destinsi pariwisata Danau poso yang meliputi wilayah Saluopa dan padamarari serta wilayah pantai siuri dan sekitarnya.

Dan dimana Tahun 2017 ini mendapat bantuan sekitar 1,3 Miliar yang akan di gunakan untuk pengembangan kawasan wisata air terjun saluopa. Kemudian pembangunan kawasan anjungan untuk pelaksanaan kegiatan Festival Danau Poso yang dimana sekarang sudah di kenal dengan Festival Pesona Danau Tektonik. Dalam hal untuk mengembangkan kawasan pariwisata danau poso, melalui beberapa program yang dapat dijadikan sebagai pendorong internal dari pemerintah daerah terhadap berkembangnya kawasan pariwisata yang ada di danau poso khususnya di

kecamatan pamona puselemba dan kabupaten poso pada umumnya.

b. Kemampuan organisasi

Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Ada dua unsur pokok dalam kemampuan organisasi yaitu: kemampuan teknis adalah pengetahuan dan penguasaan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja. Dimana seorang pegawai dalam organisasinya harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada atau pengalaman kerja yang dimiliki.

Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain adalah dimana dapat menjalani komunikasi yang baik dan juga dapat menciptakan koordinasi dalam menjalankan kerja sama dalam tugas. Dimana sesuai dengan penjelasan mengenai kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain pemerintah daerah telah berupaya dalam menciptakan kerja sama bahkan sudah melakukan koordinasi yang baik dengan organisasi lain dalam mengembangkan kawasan pariwisata danau poso. Ini sesuai dengan penjelasan dari beberapa informan.

c. Komitmen para pelaksana (implementer)

Salah satu asumsi yang seringkali keliru adalah jika pimpinan telah siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk mengerjakan dan melaksanakan sebuah kebijaksanaan yang telah disetujui amat bervariasi dan dapat dipengaruhi. Komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk mengerahkan seluruh

usaha dalam melaksanakan tugas. Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Jelas dikatakan melalui misi daerah yaitu untuk Meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha kecil menengah (UKM), koperasi, bundes, pertanian, dan pariwisata. Melalui penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan sebagai pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata danau poso melalui kegiatan-kegiatan festival. Mengatakan bahwa keberhasilan mencapai terlaksananya beberapa program strategis dari pemerintah daerah adalah membangun komitmen bersama mulai dari Kepala Daerah, Instansi terkait dalam hal ini Dinas pariwisata kabupaten poso, dan juga komitmen dari camat pamona puselemba selaku pelaksana dalam program pengembangan kawasan pariwisata danau poso, itu sudah terbukti dari penjelasan dari informan.

d. Dukungan dari kelompok kepentingan

Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program-program tersebut. Kelompok kepentingan adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi mencapainya. Terlihat bahwa adanya kerjasama

bahkan sekaligus dukungan yang diberikan oleh beberapa kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya terkait dengan program pengembangan akan pariwisata yang ada di danau poso, melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Seperti halnya peneliti mendapatkan penjelasan dari masyarakat yang juga sebagai pelaksana dalam program pengembangan kawasan pariwisata danau poso ini. Selain itu, sebagian masyarakat juga sudah mendukung serta memberikan apresiasi dengan adanya program pengembangan kawasan danau poso karena mereka mengerti keuntungannya jika wilayah mereka dijadikan salah satu tujuan wisatawan dan jelas juga akan membantu perekonomian mereka. Sehingga banyak masyarakat yang membuka warung kuliner, cendramata dan lain sebagainya agar supaya membuat daya Tarik wisatawan yang datang. Sehingga kesimpulan dari faktor pendorong implementasi program pengembangan kawasan pariwisata danau poso, yaitu bahwa pemerintah daerah mempunyai dua program strategis yang dapat dijadikan sebagai program yang dapat mengembangkan kawasan pariwisata di danau poso yang didalamnya merupakan bentuk faktor internal dari pemerintah daerah. Kemudian dari kalau dari faktor eksternal yaitu Sejauh ini yang menjadi salah satu yang mendorong yaitu dari eksternal dimana memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan kawasan pariwisata danau poso dan Pemerintah daerah itu sendiri menyambut dengan baik adanya program CSR yang di lakukan oleh PT POSO ENERGI. Dan juga memberikan respon sosial kepada lingkingan nya yaitu dimana yang berada di wilayah sekitar Danau poso. Sejauh Ini

kontribusi yang dapat diberikan melalui pengembangan kawasan pariwisata danau poso itu yaitu kesejahteraan masyarakat kata lain meningkatkan perekonomian mereka.

Kesimpulan

1. Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Program strategis seperti mengadakan event-event (icon) berupa kegiatan Festival danau poso serta mengeksplere pesona objek wisata yang ada di kecamatan pamona puselemba kabupaten poso.
2. Sejauhmana ini faktor pendorong internal memberikan kontribusi terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah melauai kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan adanya kendala dalam Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso melalui kegiatan festival danau poso dalam hal kepedulian akan lokasi yang ada. Pemerintah daerah telah berupaya merencanakan berbagai tahapan-tahapan mencakup pengembangan pariwisata dengan Membangun relasi atau kerjasama dengan organisasi lain dalam hal ini PT POSO ENERGI untuk membantu dalam hal pengembangan kawasan pariwisata danau poso.

Saran

1. Meningkatkan dan Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. meningkatkan anggaran dalam sector pariwisata dan sumberdaya manusia, agar tidak hanya terfokus pada satu titik program saja karena kurangnya anggaran yang ada.

2. Pemerintah daerah lebih lagi meningkatkan kepedulian akan kawasan festival danau poso bukan hanya pada saat kegiatan itu berlangsung.
3. Lebih lagi dapat memperhatikan beberapa objek wisata yang ada tidak hanya pada satu titik saja. Dimana juga lebih lagi memperhatikan fasilitas yang ada dikawasan festival danau poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Ali, F. 2012. Studi Analisa Kebijakan, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Wardiyanta, M.Hum 2006. Metode Penelitian Pariwisata, Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).
- Erwan Agus Purwanto, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Labolo M. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meleong, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Rohman Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sugiyono 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Santosa 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Refika Aditama
- Siti Erna Latifi Suryana 2009 Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang". Tesis: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Otonomi Daerah, Jakarta: Kementerian Pembangunan Nasional.
- Syukur Abdullah 2011. Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, Sumber-Sumber Lain :
- UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatawan,
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
- Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2032.